

MANAJEMEN STRATEGI PUSAT PENGENDALIAN OPERASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA TANGERANG

Novia Ariany Soimah*, Rahmawati

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: novearianysmh@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang dalam mendukung pelayanan penanggulangan bencana di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusdalops telah menjalankan fungsi strategis sebagai pusat komando, koordinasi, dan pengelolaan informasi kebencanaan selama 24 jam, meliputi pemantauan wilayah, penerimaan laporan, serta koordinasi lintas sektor. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya Tim Reaksi Cepat (TRC) khusus Pusdalops, serta sistem informasi kebencanaan yang belum terintegrasi secara real time. Dari sisi strategi, Pusdalops telah menerapkan tahapan manajemen strategi yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi dan pengendalian. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun manajemen strategi Pusdalops telah berjalan sesuai tahapan, efektivitasnya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pada aspek sumber daya, teknologi, dan sistem koordinasi untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pusdalops, BPBD, Penanggulangan Bencana

Abstract. This research aims to analyze the strategic management of the Disaster Management Operations Control Center (Pusdalops) of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Tangerang City in supporting urban disaster management services. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation, utilizing both primary and secondary data sources. The results show that Pusdalops has carried out its strategic role as a command center, coordination hub, and disaster information management unit operating 24 hours, including monitoring, receiving reports, and coordinating across sectors. However, several challenges remain, such as limited human resources, the absence of a dedicated Rapid Response Team (TRC), and disaster information systems that are not yet fully integrated in real time. From a strategic perspective, Pusdalops has implemented the stages of strategic management, including environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and control. In conclusion, although the strategic management of Pusdalops has been implemented according to the established stages, its effectiveness is not yet optimal, thus requiring improvements in resources, technology, and coordination systems to enhance disaster management performance.

Keywords: Strategic Management, Pusdalops, BPBD, Disaster Management

Copyright©2026. Novea Ariany Soimah, Rahmawati

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v3i2.69>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik geografis unik yang terletak di garis khatulistiwa serta pertemuan dua benua dan dua samudra. Kondisi ini memberikan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan (Lina et al., 2024). Dalam laporan *World Risk Report 2025*,

Correspondence Novea Ariany Soimah  Email: novearianysmh@gmail.com

Manajemen Strategi Pusat Pengendalian Operasi BPBD dalam Penanggulangan Bencana

Indonesia menempati peringkat ketiga risiko bencana tertinggi di dunia setelah Philipina dan India. Dikarenakan faktor tersebut, maka dituntut penguatan sistem penanggulangan bencana melalui peran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi hingga rehabilitasi (Azizah et al., 2022). Salah satu bidang dalam struktur BPBD adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) yang berfungsi sebagai pusat komando, koordinasi, dan pengelolaan informasi secara *real-time*. Pusdalops menjadi elemen kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat kebencanaan (Sofiana & Jamil, 2025).

Penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga melalui upaya pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan forum relawan, penyusunan peta risiko bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, penguatan kelembagaan dan pengelolaan potensi lokal menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana secara berkelanjutan (Igirisa et al., 2019). Seiring dengan meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana, kebutuhan terhadap sistem pengendalian operasi yang optimal semakin mendesak. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kinerja sistem komando yang lemah, koordinasi, serta integrasi informasi yang menandakan bahwa pentingnya fungsi Pusdalops dan sistem informasi dalam kebencanaan, seperti Penelitian Romadhan dkk. (2022) mengungkapkan bahwa keterlambatan respons bencana di tingkat daerah sering disebabkan oleh lemahnya sistem komando dan koordinasi.

Selanjutnya, Alamsyah dan Wahyudi (2024) menegaskan bahwa integrasi sistem informasi kebencanaan merupakan faktor kunci dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Penelitian lain oleh Santoso dan Hamid (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penguatan Pusdalops di daerah masih belum optimal, terutama pada aspek sumber daya manusia, koordinasi, dan dukungan teknologi. Selain itu, Lestari dkk. (2022) menemukan bahwa keterbatasan integrasi sistem informasi dapat menghambat alur komunikasi dan memperlambat respons darurat. Sementara itu, Prastiyo dkk. (2025) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan Pusdalops sangat bergantung pada sinergi antara sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme koordinasi yang terencana.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji aspek operasional Pusdalops, sebagian besar masih berfokus pada faktor teknis seperti komunikasi, koordinasi, dan sistem informasi secara parsial. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji pengelolaan Pusdalops menggunakan perspektif manajemen strategi yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi dalam satu kerangka yang utuh. Oleh karena itu, kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan manajemen strategi untuk menganalisis pengelolaan Pusdalops BPBD, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis dan menyeluruh mengenai bagaimana strategi organisasi dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah perkotaan dengan tingkat urbanisasi tinggi memiliki kerentanan yang signifikan terhadap bencana, terutama banjir, kebakaran, dan cuaca ekstrem (Eristiawan & Suharni, 2021). Data BPBD Kota Tangerang

menunjukkan bahwa banjir dan kebakaran merupakan bencana yang paling dominan terjadi setiap tahun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana di Kota Tangerang tahun 2021-2024

Jumlah Kejadian Bencana di Kota Tangerang					
No	Bencana	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Banjir	34	17	52	79
2	Cuaca Ekstrem	74	27	77	77
3	Gempa Bumi	0	1	1	1
4	Karhutla	0	0	1	0
5	Kebakaran	168	164	310	249
TOTAL		276	209	441	406

Sumber: Pusdalops BPBD Kota Tangerang, 2025

Berdasarkan data kejadian bencana di Kota Tangerang tahun 2021–2024, frekuensi bencana menunjukkan tren fluktuatif namun tetap tinggi, terutama pada kebakaran, banjir, dan cuaca ekstrem. Kebakaran menjadi bencana paling dominan setiap tahun, sementara banjir mengalami peningkatan signifikan hingga 79 kejadian pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang masih memiliki tingkat kerentanan yang cukup besar terhadap bencana. Tingkat kerentanan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kejadian, tetapi juga oleh faktor kapasitas dan potensi bahaya, yang selanjutnya tercermin dalam nilai Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang tahun 2022–2024 pada tabel berikut:

Tabel 2. Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang Tahun 2022 - 2024.

Indeks Risiko Bencana Kota Tangerang		
Tahun	Skor	Kelas Risiko
2022	116.80	Sedang
2023	104.55	Sedang
2024	95.74	Sedang

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut terjadi tren penurunan indeks bencana sebesar 12,25 poin pada tahun 2023 dan penurunan sebesar 8,81 poin pada tahun 2024. Meskipun demikian, secara klasifikasi Kota Tangerang masih berada pada kategori risiko sedang selama tiga tahun berturut-turut. Penurunan skor ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kapasitas penanggulangan bencana atau pengurangan tingkat kerentanan, namun belum cukup signifikan untuk mengubah kelas risiko menjadi rendah. Hal ini menandakan bahwa strategi pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan antara tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah.

Peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait masih belum bergesernya status bencana menjadi rendah di Kota Tangerang yang disebabkan karena *pertama*, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya di bagian Pusdalops. Sebagai pusat data dan informasi bencana, tugas personil Pusdalops bersiaga selama 24 jam.

Beban kerja yang besar berbanding terbalik dengan jumlah pegawai di Pusdalops. Hal ini dapat berpotensi menurunkan efektivitas pemantauan wilayah, pengolahan dan penyebaran informasi, serta koordinasi lapangan kecepatan penyampaian informasi bencana, terlebih saat terjadi bencana skala besar atau beberapa kejadian secara bersama. Sebagaimana hasil penelitian bahwa persoalan keterbatasan personil Pusdalops serta pembagian tugas yang belum jelas menjadi faktor penghambat belum optimalnya kinerja Pusdalops dalam penanggulangan bencana (Santoso & Hamid, 2024).

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional. Beberapa perangkat komunikasi, sistem informasi kebencanaan, serta fasilitas pemantauan belum sepenuhnya terintegrasi secara real time, sehingga proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi kebencanaan belum berjalan secara optimal. Padahal, dalam manajemen kedaruratan bencana, kecepatan dan akurasi informasi merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas respons. Penelitian mengenai sistem komunikasi dan informasi kebencanaan di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi yang belum optimal dapat menghambat koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan dalam situasi darurat (Lestari et al., 2022). Demikian juga hasil penelitian bahwa keberhasilan pengelolaan informasi bencana sangat bergantung pada integrasi antara sumber daya manusia, teknologi, dan mekanisme koordinasi yang terencana di Pusdalops Provinsi Jawa Timur (Prastiyo et al., 2025).

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kondisi aktual pengelolaan Pusdalops, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung kinerjanya, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan kapasitas Pusdalops. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian manajemen bencana di sektor publik, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam upaya penguatan sistem penanggulangan bencana di Kota Tangerang secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk membedah dinamika manajemen strategi di Pusdalops BPBD Kota Tangerang secara mendalam dan naturalistik. Sesuai dengan teori Sugiyono (2019), peneliti terjun langsung ke lokasi guna menangkap fenomena empiris melalui pengamatan, pencatatan, dan penafsiran data yang ditemukan di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui observasi serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang mengelola operasional penanggulangan bencana, sementara data sekunder diperkuat melalui analisis dokumen resmi seperti SOP, laporan kebencanaan, dan regulasi terkait.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahap kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan merujuk pada model Abdussamad (2021). Hasil temuan dianalisis menggunakan kerangka manajemen strategi dari Hunger dan Wheelen dalam Rachmat (2014) untuk menghasilkan narasi yang komprehensif. Guna memperoleh data yang kredibel, pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria otoritas dan pemahaman teknis terhadap operasional organisasi. Dalam kaitan ini, subjek penelitian diklasifikasikan ke dalam

kategori *key informan* (informan kunci) dan *secondary informan* (informan pendukung). Adapun total informan yang dilibatkan dalam studi ini berjumlah 8 orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

Jenis Informan	Informan	Status Informan
Key Informan	Bapak A	Supervisor Pusdalops BPBD Kota Tangerang
	Bapak B	Staff Operator Pusdalops BPBD Kota Tangerang
	Bapak C	Staff Operator Pusdalops BPBD Kota Tangerang
	Bapak D	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang
	Bapak E	Kepala Bidang Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang
	Bapak F	Akademisi Bencana Universitas Muhammadiyah Tangerang
Secondary Informan	Bapak G	Pelaku usaha terkena bencana
	Bapak H	Masyarakat terkena bencana

Sumber: Penulis (2026)

HASIL DAN DISKUSI

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang berlokasi di Jalan Daan Mogot No. 67, Kota Tangerang. Secara struktural, Pusdalops didukung oleh 6 personel yang terdiri dari beberapa jabatan, yaitu pengawas, penanggung jawab, manajer, supervisor, dan operator. Namun, berdasarkan hasil penelitian, hanya sekitar 3 orang yang aktif menjalankan operasional harian, yakni 1 supervisor dan 2 operator. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah personel yang tersedia belum memenuhi standar ideal operasional Pusdalops, terutama dalam mendukung sistem kerja 24 jam.

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut berdampak pada tingginya beban kerja serta belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan akurat. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan kerangka manajemen strategis Hunger dan Wheelen, khususnya pada aspek implementasi strategi yang menekankan pentingnya kesesuaian antara struktur organisasi dan ketersediaan sumber daya manusia. Kerangka tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi serta sinergi antar pemangku kepentingan (Diantika et al., 2024).

Pengamatan Lingkungan

Fase awal dalam manajemen strategi dimulai dengan pemindaian lingkungan, yang berfungsi untuk memetakan peluang serta tantangan eksternal sekaligus mengevaluasi kapabilitas internal berupa kekuatan dan keterbatasan yang dimiliki organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusdalops BPBD Kota Tangerang memiliki sejumlah kekuatan internal yang mendukung efektivitas pengendalian operasi penanggulangan bencana, di antaranya keberadaan ruang khusus Pusdalops sebagai pusat komando yang memungkinkan koordinasi, pemantauan, dan pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat dan terintegrasi, sejalan dengan penelitian Puji Lestari dkk. (2022) yang menegaskan pentingnya ruang operasional dalam meningkatkan efektivitas koordinasi.

Selain itu, sistem pelaporan yang rapi dan terstruktur menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan, karena memungkinkan pembelajaran dari setiap kejadian bencana dan perbaikan strategi ke depan, sesuai dengan fungsi Pusdalops sebagai pusat pengelolaan data dan informasi kebencanaan. Kekuatan lainnya adalah penerapan sistem operasional 24 jam dengan pola kerja shift yang mendukung pemantauan wilayah dan penerimaan laporan secara real time, yang sejalan dengan penelitian Lomban dan Jamalullail (2022) bahwa keberlangsungan operasional dan kecepatan informasi berpengaruh terhadap keberhasilan respons bencana. Selain itu, penggunaan media komunikasi digital seperti WhatsApp juga memperkuat koordinasi melalui penyampaian informasi yang cepat oleh aparat dan masyarakat (Lestari et al., 2022).

Di sisi lain, hasil penelitian mengungkapkan adanya sejumlah kelemahan internal yang mempengaruhi efektivitas kinerja Pusdalops BPBD Kota Tangerang, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang belum sebanding dengan tuntutan operasional selama 24 jam. Kondisi ini terlihat dari jumlah personel inti yang terbatas, yaitu hanya tiga orang yang harus bekerja secara bergantian, serta belum tersedianya Tim Reaksi Cepat (TRC) khusus, sehingga berdampak pada terhambatnya respons awal di lapangan. Di samping itu, minimnya alokasi dana turut menghambat upaya peningkatan kemampuan kelembagaan, termasuk dalam pengadaan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem operasional.

Minimnya ketersediaan tenaga ahli serta ketidakcukupan fasilitas pendukung menjadi faktor yang menghambat optimalisasi kinerja Pusdalops, sementara keterbatasan anggaran juga berperan signifikan dalam menurunkan efektivitas penanggulangan bencana di tingkat daerah (Santoso & Hamid, 2024). Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana, terutama pada sistem informasi kebencanaan yang belum terintegrasi secara real time sehingga masih bergantung pada proses manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana memiliki peran yang sangat krusial dalam menunjang efektivitas respons kebencanaan (Asiah, 2023).

Dari aspek eksternal, terdapat peluang strategis dalam meningkatkan kinerja Pusdalops melalui dukungan stakeholder seperti instansi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, yang memperkuat kapasitas organisasi dan efektivitas penanggulangan bencana, sejalan dengan Andryman dkk. (2024) yang menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Selain itu, keberadaan program Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dan peran aktif relawan menjadi peluang dalam meningkatkan kesiapsiagaan, di mana masyarakat bertransformasi menjadi mitra partisipatif yang berkontribusi dalam penyampaian informasi secara real time, sehingga mempercepat deteksi dan respons bencana. Hal ini sejalan dengan penelitian (Defna dkk. (2026) yang menyatakan bahwa keterlibatan komunitas lokal dan jaringan informasi masyarakat mampu mengurangi waktu respons dan mempercepat proses evakuasi, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dalam penanggulangan bencana.

Di sisi lain, terdapat sejumlah ancaman eksternal yang kompleks. Kondisi geografis Kota Tangerang sebagai wilayah dataran rendah dengan tingkat urbanisasi tinggi meningkatkan kerentanan terhadap banjir, kebakaran permukiman, dan cuaca ekstrem (Eristiawan & Suharini, 2021). Hal ini diperburuk oleh tingginya kepadatan penduduk yang meningkatkan potensi risiko dan dampak sosial-ekonomi saat bencana terjadi. Ancaman berikutnya adalah frekuensi kejadian bencana yang fluktuatif namun tetap

tinggi setiap tahunnya, di mana menurut Andryman dkk. (2024), daerah dengan frekuensi bencana tinggi memerlukan sistem pengendalian operasi yang lebih responsif untuk mencegah kegagalan pencapaian sasaran. Terakhir, pola aktivitas masyarakat yang masih mengabaikan kelestarian ekosistem sekitar, seperti kebiasaan membuang sampah ke sungai, menjadi faktor antropogenik utama yang memicu banjir. Penelitian Saniyyah Defna dkk. (2026) menegaskan bahwa faktor perilaku manusia dan buruknya manajemen pembuangan sampah merupakan penyebab fundamental meningkatnya risiko bencana di wilayah perkotaan.

Perumusan strategi

Fase formulasi strategi mengharuskan lembaga untuk mengartikulasikan misi, sasaran, rencana strategis, dan pedoman operasional. Langkah ini menjadi fondasi krusial dalam merespons fluktuasi eksternal, di mana organisasi merumuskan visi jangka panjang demi memitigasi risiko sekaligus mengeksplorasi celah keuntungan yang ditemukan saat analisis lingkungan. Strategi Pusdalops BPBD Kota Tangerang dirumuskan untuk menjawab kebutuhan akan kecepatan informasi dan koordinasi dalam penanganan bencana perkotaan yang kompleks. Berdasarkan hasil penelitian, Pusdalops BPBD Kota Tangerang merumuskan strategi pelayanan kebencanaan dengan berorientasi pada kecepatan informasi, koordinasi lintas sektor, serta penguatan respons darurat berbasis sistem komando.

Misi dan Tujuan Strategis

Misi utama Pusdalops BPBD Kota Tangerang adalah menjadi "telinga dan mata" bagi Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD dalam memonitor seluruh dinamika kebencanaan di wilayah kota. Fokus utama dari misi ini adalah memastikan aliran informasi berjalan tanpa hambatan guna mendukung pengambilan keputusan komando yang tepat. Sejalan dengan misi tersebut, tujuan strategis yang ditetapkan adalah meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, khususnya pada fase tanggap darurat, agar bencana dapat ditanggulangi sedini mungkin sehingga risiko kerugian jiwa dan aset di Kota Tangerang dapat diminimalisir. Pemulihan keadaan secara responsif dan sistematis setelah terjadinya bencana harus menjadi inti dari misi strategis institusi terkait (Laksamana et al., 2026).

Strategi Operasional

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pusdalops BPBD Kota Tangerang merumuskan empat strategi utama:

- **Strategi Kolaborasi Lintas Sektor:** Pusdalops BPBD Kota Tangerang melakukan koordinasi terpadu dengan berbagai instansi pada tahap prabencana, saat darurat, hingga pascabencana. Hal ini diperkuat oleh penelitian Muhamad Bilal (2025) yang menyatakan bahwa BPBD Kota Tangerang telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan tenaga medis, untuk meningkatkan efektivitas operasional.
- **Strategi *Size-Up*:** Strategi ini berfokus pada penilaian cepat situasi saat bencana terjadi untuk menentukan skala prioritas penanganan. Pendekatan ini selaras dengan penelitian Rivaldy dkk. (2025) yang menekankan pentingnya respon

strategis dan terukur melalui kaji cepat bencana untuk menilai kebutuhan serta kerusakan secara akurat.

- Strategi Prabencana (Kesiapsiagaan): Pusdalops BPBD Kota Tangerang memperkuat koordinasi dan jaring komunikasi melalui pelatihan serta pemeliharaan sistem informasi untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi ancaman sewaktu-waktu.

Kebijakan Strategis

Sebagai pedoman pelaksanaan, perumusan strategi ini berpijak pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana serta kebijakan sistem komando nasional. Kebijakan ini memastikan bahwa Pusdalops memiliki legitimasi hukum dalam menjalankan fungsi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara terintegrasi (BNPB, 2012). Sinergi antara kebijakan komando dan pedoman teknis ini sangat krusial, sebagaimana ditegaskan oleh Andryman dkk. (2024) bahwa mekanisme koordinasi yang efektif memerlukan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku agar tanggung jawab dan wewenang dapat ditetapkan dengan baik.

Implementasi strategi

Fase implementasi berfungsi sebagai jembatan yang mengubah formulasi strategis menjadi aksi operasional melalui berbagai program kerja dan kegiatan lapangan yang terencana. Dalam perspektif Wheelen dan Hunger, implementasi strategi menekankan pada bagaimana organisasi mengalokasikan sumber daya, membangun koordinasi, serta menjalankan kebijakan secara efektif demi merealisasikan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi strategi penanggulangan bencana di Kota Tangerang mencakup tiga fase utama: pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.

Implementasi Pra-Bencana (Kesiapsiagaan dan Mitigasi)

Pada tahap pra-bencana, Pusdalops BPBD Kota Tangerang melaksanakan fungsi kesiapsiagaan melalui kegiatan pemantauan dan pengelolaan informasi kebencanaan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, Pusdalops melakukan monitoring kondisi cuaca dan potensi bencana secara 24 jam penuh melalui sistem piket bergiliran. Setiap personel bertugas untuk memantau perkembangan informasi dari berbagai sumber, seperti data cuaca, laporan masyarakat, serta informasi dari instansi terkait. Selain itu, Pusdalops juga melakukan pencatatan terhadap setiap kejadian bencana maupun potensi kejadian yang terjadi di wilayah Kota Tangerang ke dalam log book dan sistem pelaporan. Pencatatan ini dilakukan secara rutin oleh petugas yang berjaga sebagai bentuk dokumentasi dan basis data kebencanaan. Selanjutnya, informasi yang telah dihimpun disusun dalam bentuk laporan harian yang disampaikan kepada pimpinan setiap pukul 19.00 WIB sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks kesiapsiagaan, Pusdalops juga menjalankan fungsi pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada pihak terkait dan masyarakat. Informasi tersebut disampaikan melalui media komunikasi seperti telepon, radio komunikasi, dan aplikasi pesan instan untuk memastikan adanya kesiapan awal apabila terjadi potensi bencana. Selain itu, Pusdalops turut melakukan pemantauan

terhadap wilayah rawan bencana serta menjaga koordinasi dengan instansi terkait sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Kegiatan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa Pusdalops memiliki fungsi utama dalam pemantauan, pengumpulan data, pengolahan informasi, serta penyebarluasan informasi kebencanaan secara cepat dan akurat sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan bencana.

Implementasi Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Pada tahap tanggap darurat, implementasi strategi berfokus pada kecepatan respons dan koordinasi lintas sektor. Pusdalops berperan sebagai pusat komando (command center) yang mengoordinasikan seluruh unsur penanggulangan bencana, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga relawan. Proses penanganan diawali dengan kegiatan *assessment* atau pengkajian cepat untuk mengetahui kondisi lapangan, yang kemudian dilanjutkan dengan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Komunikasi antarinstansi dilakukan secara intensif melalui berbagai media seperti *WhatsApp Group*, HT, dan radio frekuensi guna memastikan tidak terjadinya keterlambatan informasi. Implementasi ini menunjukkan bahwa strategi *size up* dan penguatan kecepatan respons telah dijalankan secara operasional dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Temuan ini memperkuat penelitian Muhamad Bilal (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem komunikasi digital cukup efektif dalam mempercepat pelaporan bencana di Kota Tangerang.

Implementasi Pasca-Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

Pada tahap pascabencana, implementasi strategi Pusdalops BPBD Kota Tangerang tidak berperan secara langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, melainkan berfungsi sebagai pendukung dalam penyediaan data dan informasi kebencanaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa Pusdalops memiliki tugas utama sebagai pengelola sistem informasi dan komunikasi kebencanaan, termasuk dalam menyediakan data yang dibutuhkan pada tahap pemulihan. Dalam praktiknya, setelah fase tanggap darurat berakhir, Pusdalops tetap menjalankan fungsi pemantauan dan pelaporan dengan mengumpulkan serta memperbarui data terkait dampak bencana, seperti jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta kondisi wilayah terdampak. Data tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan harian maupun laporan khusus yang menjadi dasar bagi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kota Tangerang dalam merumuskan kebijakan pemulihan.

Evaluasi dan pengendalian strategi

Evaluasi dan pengendalian merupakan tahapan penting dalam manajemen strategi untuk menilai sejauh mana strategi yang telah diimplementasikan berjalan efektif serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks Pusdalops BPBD Kota Tangerang, evaluasi dilakukan secara berkala melalui analisis data dan informasi kebencanaan yang dihimpun selama proses operasional, baik pada tahap pra bencana maupun saat tanggap darurat. Berdasarkan hasil penelitian, Pusdalops

melakukan evaluasi melalui pengolahan data kejadian bencana yang tercatat dalam *log book*, laporan harian, serta laporan khusus. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola kejadian bencana yang dominan, seperti banjir, kebakaran, dan cuaca ekstrem yang cenderung berulang setiap tahun di Kota Tangerang.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas kecepatan respons, akurasi informasi, serta koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan selama penanganan bencana. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhaida dan Arnu (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan laporan kejadian bencana merupakan instrumen penting dalam evaluasi kinerja BPBD, karena data tersebut digunakan untuk menilai efektivitas penanganan dan pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian Kesuma dan Suwaryono (2024) juga menegaskan bahwa evaluasi kebijakan BPBD dilakukan melalui analisis laporan kinerja dan data kejadian bencana guna mengukur keberhasilan strategi serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen strategi tersebut belum optimal. Keberhasilan dalam mengelola Pusdalops tidak hanya bertumpu pada kerangka kerja dan sistem yang ada. Dukungan infrastruktur digital yang memadai serta kesiagaan sumber daya menjadi elemen krusial yang turut menentukan pencapaian tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pusdalops telah menjalankan fungsi strategisnya, masih diperlukan penguatan dalam aspek internal organisasi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Kota Tangerang.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.)). Syakir Media Press.
- Alamsyah, A., & Wahyudi, E. (2024). *Transformasi Digital untuk Mitigasi Banjir: Optimalisasi Sistem Informasi di Jawa Barat*. 01(2), 50–62.
- Andryman, Sutisna, S., Kurniadi, A., Widodo, P., & Kusuma. (2024). *Strategi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kajian Literatur*. 5(2), 125–143.
- Asiah, N. (2023). Analisis Pelaksanaan Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10.
- Azizah, M., Apriadi, R. K., Januarti, R. T., Winugroho, T., Yulianto, S., Kurniawan, W., & Widana, I. D. K. K. (2022). *Kajian Risiko Bencana Berdasarkan Jumlah Kejadian dan Dampak Bencana di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2020*. 6(1), 35–40.
- Bilal, M. (2025). *Kapasitas Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Tangerang*. 1–16.
- Defna, S., Nurcahyati, & Erinaldi. (2026). *Peran Collaborative Governance dalam Menanggulangi Banjir Air Rob di Kota Dumai*. 07(1), 1–14.
- Diantika, N., Taufiq, A., & Lukita, C. (2024). *Manajemen Strategi DP3APPKB Kota Surabaya Dalam Mengembangkan Kota Layak Anak*. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*.
- Eristiawan, R. R., & Suharni, E. (2021). *Kajian terhadap Dampak dan Adaptasi Warga dalam Menghadapi Banjir di Kecamatan Periuk Kota Tangerang Tahun 2020*. *Geo*

- Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 10(2), 128–139.
- Igirisa, I., Tohopi, R., Tui, F. P., & Abdussamad, J. (2019). Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Penanggulangan Risiko Bencana Di Desa Balayo Dan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, VI, 61–72.
- Kesuma, A. A., & Suwaryono, I. L. (2024). Evaluasi Kebijakan Bpbd Kabupaten Pangandaran Dalam Upaya Penanggulangan Risiko Bencana Di Kabupaten Pangandaran. 9(1), 23–45.
- Laksamana, A. A., Kamariyah, S., & Pramudiana, I. D. (2026). *Manajemen Strategi Pelayanan BPBD Provinsi Jatim dalam Penanganan Masyarakat yang Terdampak Banjir Kota Surabaya*. 3, 104–117.
- Lestari, P., Paripurno, E. T., Nadeak, J., Julistanti, E., & Putri, H. (2022). *Simulasi Komunikasi Bencana Melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)*. 20(2), 255–272.
- Lina, F., Tarigan, B., Ginting, D., Ketaren, O., Studi, P., Kesehatan, M., Pascasarjana, D., & Mutiara, U. S. (2024). *Sosialisasi Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Masyarakat Di Asrama Hong Blok D Kampung Durian Medan*. 5(2), 155–160.
- Lomban, A. A., & Jamalullail. (2022). Komunikasi Risiko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Dalam Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 495–504.
- Nurhaida, K., & Arnu, A. P. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Laporan Kejadian Bencana Dalam Manajemen Rehabilitasi Di BPBD Kab. Karawang*. 10(November), 701–707.
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 15. (2012). *Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Prastiyo, R., Jupriono, & Prayogo, M. D. (2025). *Strategi Komunikasi PUSDALOPS PB BPBD Provinsi Jawa Timur dalam Pengolahan Informasi Bencana*. 03(02), 664–668.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. CV. Pustaka Setia.
- Rivaldy, M., Sutisna, S., Putro, R. A. P., & Maarif, S. (2025). *Manajemen Risiko Bencana Banjir Di Kota Cirebon*. 04(2).
- Romadhan, A. A., Rahman, T., Sihidi, I. T., & Hadi, K. (2022). *Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana di Bandungrejosari Kota Malang*. 4, 298–321.
- Santoso, B., & Hamid, M. S. (2024). Upaya Peningkatan Peran PUSDALOPS Dalam Penanggulangan Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi ...*, 2(1), 19–37. <http://jurnal.stiewww.ac.id/index.php/jrima/article/view/870>
- Sofiana, A., & Jamil, B. (2025). *Evaluasi Kinerja Bidang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kelurahan Babura*. 7(2), 390–397. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v7i2.6544>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.